

INFORMASI KAJIAN

Kebutuhan Perawatan di Masa Mendatang di INDONESIA

Februari 2026



TENTANG RINGKASAN INI

Ringkasan ini disusun berdasarkan laporan *“Future Demand for Care in Indonesia, the Philippines & Vietnam”* yang terbit pada Oktober 2025 sebagai hasil kolaborasi antara tim di Indonesia, Filipina, dan Vietnam di bawah arahan Global Institute for Women’s Leadership (GIWL) pada Australian National University. Di Indonesia, kajian dilakukan oleh SMERU Research Institute; di Filipina, kajian dilakukan oleh Philippine Institute for Development Studies (PIDS); dan di Vietnam, kajian dilakukan oleh Mekong Development Research Institute (MDRI).

Kajian ini disusun dalam kerja sama kemitraan dengan Investing in Women, sebuah inisiatif Pemerintah Australia yang diselenggarakan melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Pandangan dalam materi terbitan ini merupakan pandangan dari pihak penulis dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Australia. Pemerintah Australia tidak serta-merta mendukung pandangan dalam materi terbitan ini maupun menjamin akurasi atau kelengkapan informasi di dalamnya.

Pesan Utama

Perubahan demografi, sosial, dan ekonomi akan memunculkan makin banyak tekanan pada perawatan yang umumnya dilakukan oleh keluarga.



Perubahan dalam aspek demografi, seperti misalnya meningkatnya usia harapan hidup, naiknya prevalensi disabilitas, turunnya angka kesuburan, dan migrasi, yang disertai dengan berubahnya norma perawatan, akan menggeser pola perawatan yang umumnya dilakukan oleh keluarga.

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini mencapai 280 juta jiwa, maka pada tahun 2050 Indonesia akan menjadi negara dengan jumlah penduduk lanjut usia terbesar, bahkan jika dibandingkan dengan Vietnam yang populasinya menua dengan cepat, dan juga dengan Filipina.

Seiring dengan meningkatnya proporsi lansia, bersama dengan perubahan aspek demografi lainnya, akan tercipta kebutuhan yang mendesak untuk membentuk sistem perawatan alternatif yang berkesinambungan bagi anak dan lansia, serta bagi penyandang disabilitas.

Sudut pandang gender mengungkap dampak perawatan pada kesetaraan ekonomi perempuan.



Permintaan akan perawatan yang diselenggarakan secara formal akan naik pesat dalam 25 tahun ke depan, memunculkan peluang sekaligus tantangan bagi kesetaraan ekonomi perempuan.

Berdasarkan Visi Indonesia Emas 2045, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja ditargetkan mencapai 70%. Tujuan penuh ambisi ini, seiring makin banyaknya perempuan Indonesia yang berpendidikan tinggi, akan meningkatkan permintaan akan layanan perawatan berbayar, khususnya dari kalangan kelas menengah yang jumlahnya makin bertambah.

Pesatnya kenaikan permintaan akan perawatan memicu pemerintah dan sektor swasta untuk mengambil langkah.



Investasi dalam penyelenggaraan perawatan di rumah dan di masyarakat dapat mengurangi ketergantungan pada perawatan informal, yang banyak diemban oleh perempuan, dan dengan demikian dapat memperluas peluang ekonomi perempuan.

Indonesia saat ini tengah mempercepat transformasi dan reformasi dalam ekonomi perawatan melalui



Sektor swasta berperan penting dalam memenuhi permintaan perawatan, dengan jalan memberikan layanan perawatan secara langsung serta pelatihan profesi bagi tenaga kerja. Upaya ini dapat mendorong inovasi, seperti misalnya solusi digital dalam penyediaan layanan perawatan serta pelatihan.

Investasi publik dan swasta dapat mengubah sistem perawatan sehingga mendorong kesetaraan gender.



Guna memenuhi permintaan perawatan yang berubah ini, diperlukan upaya terkoordinasi dari segi hukum, kebijakan, dan masyarakat untuk mengubah norma gender dan menata kembali pembagian tanggung jawab perawatan, baik yang berbayar maupun yang tidak, untuk semua gender.



Kebijakan yang lebih terarah di tempat kerja di Indonesia dapat mendukung partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan terwujudnya pembagian perawatan yang lebih adil, misalnya melalui sistem kerja fleksibel serta cuti berbayar untuk keperluan memberikan perawatan dan menjalankan peran sebagai orang tua. Inisiatif dari pihak pemberi kerja dalam menyediakan tempat pengasuhan anak juga dapat membantu, dan layanan seperti ini juga makin berkembang di Indonesia.

Pengantar

Kebutuhan perawatan di masa mendatang di Indonesia dibentuk oleh perubahan dalam aspek demografi, komitmen kuat dari pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi perawatan di Indonesia, serta besarnya keinginan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di angkatan kerja – yang semuanya berkontribusi pada naiknya permintaan akan perawatan yang berbayar dan bermutu.

Rencana Aksi Nasional dan Peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia 2025–2045 untuk Dunia Kerja yang Transformatif, Setara, dan Adil Gender menyadari bahwa kebijakan terkait perawatan pada hakikatnya bersifat kompleks dan lintas-bidang. Dokumen tersebut mendorong transformasi dan reformasi ekonomi perawatan yang akan mendukung perempuan untuk dapat masuk dan bertahan dalam angkatan kerja, yang sangat penting untuk mencapai **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan di Indonesia hingga 70%** sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Perubahan seperti misalnya meningkatnya usia harapan hidup, naiknya prevalensi disabilitas, turunnya angka kesuburan, serta berubahnya norma perawatan **akan memunculkan semakin banyak tekanan pada perawatan yang umumnya dilakukan oleh keluarga**. Sebagaimana halnya dengan negara lain di Asia Tenggara, **urbanisasi juga semakin banyak terjadi** di Indonesia – dan ini menjadi faktor lain yang turut mendorong perubahan dalam kebutuhan perawatan.

Memahami kebutuhan perawatan di masa mendatang menjadi penting dalam mengarahkan investasi strategis pada ekonomi perawatan. Di tahun 2025, Global Institute for Women's Leadership (GIWL), melalui kerja sama dengan Investing in Women (IW), sebuah insiatif Pemerintah Australia, menerbitkan laporan berjudul *The Future Demand for Care in Indonesia, the Philippines, and Vietnam*.¹ Penelitian tersebut menekankan bagaimana investasi sektor publik dan swasta dapat mengadopsi pendekatan yang transformatif gender dengan jalan:

- Memenuhi kebutuhan perawatan secara efektif
- Mendorong kesetaraan gender
- Menghindari penguatan ketidaksetaraan gender yang telah ada

Berdasarkan laporan tersebut, dokumen ini disusun untuk membahas seperti apa perubahan kebutuhan perawatan dalam 25 tahun ke depan, dengan fokus pada Indonesia.

Sudut pandang gender mengungkap bagaimana tantangan dan peluang terkait perawatan membawa dampak berbeda bagi semua gender.



Merencanakan pemenuhan kebutuhan perawatan di masa mendatang dengan sudut pandang gender mendukung kesetaraan ekonomi perempuan.

- Di tingkat global, kerja perawatan yang tidak berbayar menghalangi kurang-lebih 708 juta perempuan masuk ke pasar tenaga kerja.²
- Rata-rata, perempuan melakukan kerja perawatan tidak berbayar dua setengah kali lebih banyak dibandingkan laki-laki.³



Meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan juga membawa keuntungan makroekonomi yang signifikan.

- Kenaikan 5,9 poin persen partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dapat mendorong kenaikan PDB hingga 8% di negara dengan perekonomian yang sedang berkembang dan baru berkembang.⁴
- Menutup ketimpangan kebijakan perawatan dan memperluas layanan perawatan dapat menciptakan sekitar 300 juta pekerjaan di tahun 2035;⁵ sekitar 70 s.d. 90% pekerjaan tersebut akan menguntungkan perempuan.⁶

¹ Lihat *Future Demand for Care in Indonesia, the Philippines & Vietnam - Investing In Women*.

² ILO, Unpaid Care Work Prevents 708 Million Women from Participating in the Labour Market, 29 Oktober 2024, <https://www.ilo.org/resource/news/unpaid-care-work-prevents-708-million-women-participating-labour-market>

³ UN Women, Redistribute Unpaid Work, n.d., diakses pada 18 Agustus 2025, <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw61/redistribute-unpaid-work>

⁴ Antoinette M. Sayeh et al., "Countries That Close Gender Gaps See Substantial Growth Returns," IMF, 27 September 2023, <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2023/09/27/countries-that-close-gendergaps-see-substantial-growth-returns>

⁵ International Labour Organization, Care at Work: Investing in Care Leave and Services for a More Gender Equal World of Work (International Labour Office, n.d.)

⁶ UN Women, Investing in Free Universal Childcare in Sub-Saharan Africa: Côte D'Ivoire, Nigeria, Rwanda, Senegal and The United Republic of Tanzania: Estimating Spending Requirements, Gendered Employment Effects and Fiscal Revenue (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), 2021)

Desain dan Metodologi Penelitian

Konsorsium Penelitian Lintas Negara

GIWL memimpin suatu konsorsium penelitian bersama dengan SMERU Research Institute di Indonesia, Philippine Institute for Development Studies di Filipina, dan Mekong Development Research Institute di Vietnam.



Pertanyaan penelitian dikelompokkan ke dalam tujuh tema utama:

1. **Transisi** demografi, sosial, dan ekonomi
2. **Pandangan terhadap perawatan** dan kaitannya dengan transisi
3. **Permintaan perawatan** dan kaitannya dengan transisi
4. **Ekspektasi dari lembaga** terkait dukungan perawatan
5. **Respons kelembagaan** terhadap permintaan akan dukungan perawatan
6. Berubahnya permintaan akan perawatan dan **kesetaraan ekonomi perempuan**
7. **Implikasi** bagi pemerintah dan sektor swasta

Pendekatan Gender Interseksional

Kerangka konseptual yang digunakan ialah **pendekatan gender interseksional** yang menelaah berbagai faktor seperti ras, suku, seksualitas, dan kelas yang membentuk kelindan atau keterpautan (*intersect*) dengan gender, yang saling berinteraksi dengan gender dan membentuk satu sama lain, alih-alih dipandang sebagai hierarki yang terpisah.⁷ Kajian ini menggunakan pendekatan metode campuran, memadukan data kualitatif dan kuantitatif yang dikumpulkan dari 335 peserta melalui wawancara, diskusi terpumpun, dan lokakarya validasi pada periode antara Oktober 2024 dan Agustus 2025. Temuan kemudian ditriangulasi, dengan melihat dokumen kebijakan dan statistik di tingkat nasional dan internasional.

Kerangka dalam Memandang Perawatan yang Berbayar dan Tidak Berbayar

Mengacu pada instrumen dari UN Women terkait perawatan berbayar dan tidak berbayar serta pendekatan lain yang melengkapinya,⁸ penelitian ini difokuskan pada ketimpangan dalam kerja perawatan dengan memperhatikan **6R**.⁹



Recognition (pengakuan), yang bertujuan agar kerja perawatan yang tidak berbayar dapat terlihat (diakui keberadaannya) serta dihargai sebagai kontributor yang signifikan pada perekonomian dan masyarakat.



Reduction (pengurangan), berfokus pada upaya mengurangi beban kerja perawatan yang tidak berbayar dan makan waktu, yang kebanyakan ditanggung perempuan.



Redistribution (redistribusi, pembagian kembali), mencakup berbagi tanggung jawab perawatan secara adil antara perempuan dan laki-laki, antara rumah tangga dan negara, dan antara sektor publik dan swasta.



Reward (penghargaan), membahas tentang kerja perawatan yang berbayar, mengadvokasi upah layak, syarat/kondisi kerja yang adil/wajar, serta perlindungan sosial guna mencerminkan nilai penting sektor ini.



Representation (keterwakilan), memastikan bahwa para pekerja perawatan punya suara dalam upaya membentuk profesi mereka, misalnya melalui formalisasi, berunding bersama, dan kebebasan berserikat.



Resilience (ketangguhan), yaitu membangun sistem perawatan yang mampu beradaptasi dan bertahan menghadapi berbagai krisis besar, seperti misalnya pandemi atau perubahan iklim.

⁷ Patricia Hill Collins, "It's All In the Family: Intersections of Gender, Race, and Nation," *Hypatia* 13, no. 3 (1998): 62–82, <https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.1998.tb01370.x>; Kimberle Crenshaw, "Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color," *Stanford Law Review* 43, no. 6 (1991): 1241, <https://doi.org/10.2307/1229039>.

⁸ UN Women, "A Toolkit on Paid and Unpaid Care Work: From 3rs to 5rs," 2022

⁹ Penjabaran lebih luas dari dokumen International Labor Organization yang bertajuk *5R Framework for Decent Care Work* dengan menambahkan aspek *resilience* (ketangguhan).

Transisi Utama dalam Aspek Demografi, Sosial, dan Ekonomi

Beberapa tren utama secara konsisten muncul di Indonesia, Filipina, dan Vietnam, yang mencerminkan terjadinya pergeseran struktural dan berubahnya ekspektasi sosial terkait tanggung jawab perawatan. Tren tersebut secara konsisten mengarah pada perubahan permintaan akan perawatan di masa mendatang, yang terkait dengan kuantitas, kualitas, dan kompleksitas.



Pada tahun 2050, di Indonesia diperkirakan akan mempunyai

49 juta
orang berusia
65 tahun atau lebih.

Pada tahun 2045, Indonesia ingin agar tercapai sebanyak

70%
partisipasi
perempuan di
angkatan kerja.



BERUBAHNYA STRUKTUR PENDUDUK

Bertambahnya proporsi penduduk lansia serta banyaknya lansia yang hidup sendiri dan memerlukan bantuan dalam melakukan kegiatan sehari-hari meningkatkan kebutuhan akan perawatan.

Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 280 juta orang, yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk lanjut usia terbanyak dibandingkan dengan Filipina dan Vietnam di tahun 2050.

NAIKNYA PREVALENSI DISABILITAS

Disabilitas yang terjadi karena penurunan fungsi akibat bertambahnya usia, serta makin banyaknya diagnosis awal pada anak, turut andil pada meningkatnya permintaan untuk mendapatkan dukungan perawatan. Akan terjadi kenaikan besar dalam kebutuhan untuk mendapatkan layanan yang fleksibel dan berbasis kebutuhan, teknologi alat bantu, dan tenaga kerja yang terampil di bidang perawatan yang bisa mendukung otonomi dan pengakuan sosial.

MIGRASI

Perpindahan generasi muda dari pedesaan ke perkotaan demi peluang ekonomi turut mengganggu model perawatan yang umumnya dilakukan di keluarga. Perubahan demografi ini berkontribusi pada naiknya proporsi lansia yang hidup sendiri.

Data sensus tahun 2010 di Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 1,7 juta lansia – atau 9,8% dari populasi lansia – hidup sendiri, dan kebanyakan hal ini dilakoni oleh perempuan.¹⁰

NORMA GENDER TENTANG PERAWATAN

Perawatan kebanyakan tetap menjadi tanggung jawab perempuan. Perempuan menanggung begitu banyak kerja perawatan yang tidak berbayar, dengan mayoritas merupakan pekerja rumah tangga dengan upah murah dan perlindungan tidak memadai. Di negara-negara yang dikaji, praktik perawatan banyak dibentuk oleh norma dan ekspektasi budaya.

Seperti di negara lainnya dalam studi ini, perawatan yang dilakukan oleh anggota keluarga tetap menjadi bentuk perawatan yang lebih disukai di Indonesia dibandingkan dengan perawatan di fasilitas resmi bagi lansia, anak, atau penyandang disabilitas.

¹⁰ Sri Moertiningsih Adioetomo dan Ghazy Mujahid, Indonesia on the Threshold of Population Ageing, UNFPA Indonesia Monograph Series: No.1 (UNFPA Indonesia, 2014).

Akan tetapi, generasi muda mulai menunjukkan pergeseran sikap dan perilaku terhadap pembagian yang lebih setara dalam tanggung jawab perawatan bagi anak dan dewasa.¹¹

TREN DAN KEBIJAKAN PASAR TENAGA KERJA

Meningkatnya pendidikan di kalangan perempuan serta permintaan pasar tenaga kerja kemungkinan mendorong makin besarnya kebutuhan akan layanan perawatan berbayar, khususnya bagi anak, seiring dengan perempuan masuk ke angkatan kerja.

Di Indonesia, tingkat pendidikan perempuan membentuk alur keberadaan yang sangat berbeda bagi perempuan di pasar tenaga kerja. Perempuan dengan pendidikan di atas sekolah menengah cenderung lebih lekat dan lebih bertahan di pasar tenaga kerja, termasuk pada masa mereka melahirkan dan punya anak.¹² Hal ini menunjukkan bahwa perempuan berada dalam posisi yang lebih baik dalam mengakses dukungan perawatan dan dalam menghadapi biaya peluang yang lebih besar apabila mereka keluar dari angkatan kerja, berkat keterampilan, potensi pendapatan, dan lebih banyak akses ke peluang profesional.

Visi Indonesia Emas 2045 mencita-citakan tercapainya angka partisipasi perempuan di angkatan kerja sebesar 70%; hal ini diperkirakan akan meningkatkan permintaan akan layanan perawatan berbayar.

TUMBUHNYA KELAS MENENGAH

Populasi kelas menengah dengan besaran pendapatan yang dapat dibelanjakan juga bertambah banyak; hal ini meningkatkan permintaan sekaligus kemampuan untuk mendapatkan solusi layanan perawatan yang berbayar dan bermutu.

Indonesia melaporkan pertumbuhan PDB tahunan sebesar 5% di 2024;¹³ satu dari lima orang di Indonesia tergolong sebagai kelas menengah – yang mencapai kurang-lebih 52 juta orang.¹⁴¹⁵

PERUBAHAN IKLIM

Bencana terkait perubahan iklim mengganggu infrastruktur perawatan dan banyak berdampak pada kelompok rentan, sehingga semakin membebani sistem perawatan. Perempuan, yang memang sejauh ini menanggung lebih banyak kerja perawatan yang tidak berbayar, dihadapkan pada tanggung jawab yang jauh lebih besar pada saat dan setelah terjadinya bencana. Selain itu, guncangan iklim kerap memaksa rumah tangga untuk mengalihkan belanja mereka bagi kebutuhan pemulihan diri setelah bencana, yang semakin menekan jumlah pendapatan yang dapat digunakan sehingga tidak lagi bisa dibelanjakan untuk keperluan perawatan.

ASPIRASI PEMERINTAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI

Target pertumbuhan ekonomi pemerintah akan bergantung pada dukungan bagi pekerja dalam memenuhi tanggung jawab perawatan mereka, sehingga meningkatkan kebutuhan akan solusi perawatan di lembaga/fasilitas resmi. Saat ini, aspirasi pemerintah tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan tanggung jawab perawatan dan kebutuhan para pekerja perawatan dan pihak yang menerima perawatan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Indonesia naik

3%

dari 50% di 1990 menjadi 53% di 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan ekonomi perempuan masih belum mendapat dukungan manakala kerja perawatan yang tidak berbayar kebanyakan dilakukan perempuan.



¹¹ Kajian pendamping tentang Social Norms, Attitudes, and Practices (SNAP) oleh GIWL bekerja sama dengan IW, akan terbit pada Februari 2026.

¹² Sarah Xue Dong dan Nurina Merdikawati, "New Opportunities and Old Constraints: Gender Equality in the Post-Suharto Era from an Economic Perspective," dalam Gender Equality and Diversity in Indonesia (ISEAS–Yusof Ishak Institute Singapore, 2023), <https://doi.org/10.1355/9789815104561-013>

¹³ Angka pertumbuhan PDB tahunan diambil dari World Bank, <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG>.

¹⁴ World Bank, *Aspiring Indonesia - Expanding the Middle Class*

¹⁵ World Bank (2019) mendefinisikan kelas menengah di Indonesia sebagai orang yang mapan secara ekonomi dengan risiko kecil untuk kembali terjatuh dalam kemiskinan atau kerentanan. Kelompok ini dicirikan dengan tingkat konsumsi per kapita antara 1,2 juta dan 6 juta Rupiah per bulan (setara dengan US\$7,75–38 per orang per hari di 2016 disesuaikan dengan PPP/Paritas Daya Beli).

Indonesia digadang-gadang menjadi salah satu dari lima perekonomian terbesar di dunia di tahun 2050.¹⁶ Tanpa perencanaan yang jelas, Indonesia berisiko tidak dapat menyokong tenaga kerjanya untuk memenuhi tanggung jawab perawatan dan tidak mampu memberikan layanan bermutu yang memungkinkan warga mewujudkan potensi mereka sepenuhnya. Anak-anak Indonesia, misalnya, diproyeksikan hanya dapat mencapai separuh potensi produktivitas mereka ketika mencapai usia dewasa.¹⁷

Pergeseran ini saling berinteraksi dan mengokohkan, kerap kali memberikan tekanan pada perawatan yang umumnya dilakukan di keluarga. Di bawah kondisi *status quo*, kesetaraan ekonomi perempuan tetap tidak atau belum mendapatkan dukungan yang semestinya, karena banyaknya beban perawatan yang tidak dibayar yang terus ditanggung oleh perempuan.

Pandangan dan Permintaan akan Perawatan dan Kaitannya dengan Transisi

Sebagai pihak yang banyak mengemban tanggung jawab perawatan, perempuan diharapkan mengurus anak, cucu, pasangan, orang tua, mertua, dan penyandang disabilitas.

Kebutuhan biaya hidup membuat rumah tangga perlu memiliki dua pendapatan, mengakibatkan perubahan dalam pembagian tanggung jawab perawatan, misalnya laki-laki jadi makin terlibat, atau dengan alih-daya ke pihak luar (*outsourcing*). Pembagian ulang (redistribusi) ini kebanyakan didorong oleh kebutuhan ekonomi dan bukan sebagai upaya sengaja untuk mendukung partisipasi perempuan di angkatan kerja.

Terjadi kenaikan permintaan untuk mendapatkan perawatan holistik di berbagai tahap kehidupan – anak, lansia, penyandang disabilitas.



Anak — terjadi pergeseran ekspektasi, tidak hanya sekadar akses dasar ke layanan anak usia dini namun juga ke pendidikan usia dini yang bermutu. Permintaan tidak terbatas hanya dari rumah tangga berpendapatan tinggi.



Lansia — kebutuhan perawatan terus berkembang, tidak hanya untuk kesehatan fisik namun juga kesehatan jiwa dan interaksi sosial.



Penyandang disabilitas — perawatan yang diberikan harus mendukung pengembangan diri, otonomi, dan inklusi.

Wawancara penelitian menunjukkan adanya keinginan kuat pada penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan tetap aktif secara ekonomi, dengan penekanan bahwa perawatan hendaknya dipandang sebagai hal yang “wajar/normal dan bisa diterima” dengan tetap menjaga otonomi orang yang bersangkutan.

Tanpa perubahan praktis dan normatif, **praktik yang ada saat ini berisiko memperparah ketergantungan, dengan beban perawatan banyak ditanggung oleh keluarga dan khususnya perempuan.**

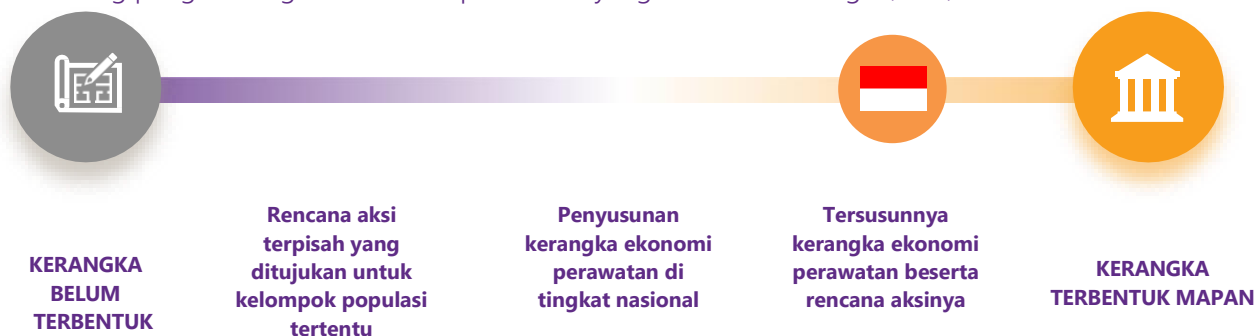


¹⁶ Jan Hatzius et al., *The Path to 2075 - The Positive Story of Global Aging* (Goldman Sachs, 2025).

¹⁷ World Bank, *Human Capital Country Brief - Indonesia* (World Bank, 2022).

Respons Kelembagaan pada Permintaan untuk Dukungan Perawatan

Di Indonesia, Filipina, dan Vietnam, terdapat bukti adanya respons yang terus berkembang dalam bentuk kerangka kebijakan, kebijakan perawatan yang dikeluarkan oleh pihak pemberi kerja, penyediaan layanan perawatan, penyediaan pelatihan perawatan, dan pengembangan layanan inovatif. Tersedianya kerangka nasional atau peta jalan yang terpadu untuk ekonomi perawatan merupakan hal penting untuk mendukung pengembangan ekosistem perawatan yang berkesinambungan, adil, dan inklusif.



Dari tiga negara yang dikaji, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang memiliki peta jalan ekonomi perawatan beserta rencana aksinya—Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan untuk Dunia Kerja yang Transformatif, Setara, dan Adil Gender 2025–2045, seperti ditunjukkan pada kerangka di atas.

Hal ini sejalan dengan tiap tahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2025–2045) yang mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.

Pemerintah **menetapkan kerangka peraturan** untuk mendukung ekonomi perawatan. Akan tetapi, karena **terbatasnya dana publik**, pemerintah kerap kesulitan dalam memperluas skala penyediaan perawatan ataupun ekosistemnya—menjadikan keterlibatan sektor swasta sangat penting.

Sektor swasta tetap merupakan penyedia layanan perawatan utama. Mengingat preferensi untuk mendapatkan perawatan di rumah, sektor swasta menjadi yang terdepan dalam menyediakan layanan tersebut, terutama melalui platform digital yang menghubungkan keluarga dengan pekerja yang terlatih untuk melakukan perawatan.

Di Indonesia, sebagian contohnya ialah Lovecare, Insan Medika, dan MyNurse.

Penyediaan pelatihan dan sertifikasi bagi pekerja perawatan menjadi penting untuk meningkatkan ekonomi perawatan, dan sektor swasta merupakan penyedia utama yang menyelenggarakan **pelatihan dan pendidikan perawatan**.

Terlepas dari penyediaan secara langsung, sektor swasta juga berada dalam posisi terbaik untuk **mendorong inovasi dalam sistem perawatan**, seperti misalnya melalui usaha rintisan (*start-up*) yang mengembangkan solusi digital (misalnya, *telehealth*, layanan yang diakses melalui aplikasi untuk mendapatkan perawatan di rumah).

BAGAIMANA RESPONS PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PERUBAHAN DALAM PERMINTAAN UNTUK PERAWATAN:

PEMERINTAH

- Kebijakan pemberian insentif bagi pelaku usaha untuk menjalankan program perawatan (mis., sebagai pengurang pajak, subsidi)
- Penyediaan subsidi pemerintah agar perawatan formal menjadi lebih terjangkau
- Menetapkan kebijakan, program, dan standar untuk memastikan mutu perawatan

PEMBERI KERJA

- **Kebijakan cuti orang tua untuk keperluan perawatan dan keperluan** bisa mendorong agar beban perawatan dapat lebih terbagi, meskipun tingkat pemanfaatannya masih belum jelas
- **Sistem kerja fleksibel** yang didukung oleh pemberi kerja berpotensi membantu pekerja menyeimbangkan antara tanggung jawab pekerjaan dan perawatan
- Penyediaan **fasilitas** atau dukungan tambahan lainnya di tempat kerja untuk penitipan/pengasuhan anak

PENYEDIA DARI PIHAK SWASTA

- Preferensi untuk mendapatkan perawatan di rumah mendorong tumbuhnya layanan perawatan dari sektor swasta
- Usaha rintisan (*start-up*) mengembangkan layanan inovatif yang memperluas ekosistem perawatan. **Misalnya:**
 1. Layanan untuk membantu lembaga publik dan swasta merekrut penyandang disabilitas dan menyediakan pelatihan untuk memperbesar peluang mereka mendapat pekerjaan.
 2. Aplikasi yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan emosional pada lansia

LEMBAGA INTERNASIONAL

- Memberikan bantuan teknis dalam penyusunan kerangka kebijakan dan panduan
- Mendanai penelitian, serta melakukan kegiatan rintisan (*piloting*) atau memperluas skala solusi perawatan yang inovatif melalui kolaborasi dengan masyarakat sipil dan organisasi nirlaba.

CONTOH BAGAIMANA INDONESIA MENANGGAPI PERMINTAAN PERAWATAN DI MASA MENDATANG

Membangun kerangka ekonomi perawatan di tingkat nasional

Kolaborasi efektif antara berbagai kementerian dan lembaga mensyaratkan kerangka strategis jangka panjang dengan tujuan dan tanggung jawab yang jelas. Arah kebijakan Indonesia 2025–2045 beserta program prioritas untuk ekonomi perawatan menawarkan model untuk menetapkan kementerian dan lembaga yang bertindak sebagai pengampu dan pendukung untuk masing-masing inisiatif. Akan tetapi, meskipun tiap tugas di bawah kerangka kerja ini diberikan ke kementerian spesifik sebagai pengampunya, tetap diperlukan satu entitas payung untuk melacak kemajuan secara keseluruhan.

Mengalokasikan secara strategis sumber daya fiskal yang terbatas

Di tahun 2020, besarnya PDB Indonesia yang ditetapkan untuk Pendidikan Anak Usia Dini hanya 0,03%, dengan 1% dialokasikan untuk layanan pengasuhan anak, yaitu Taman Penitipan Anak (TPA). Di sisi lain, negara-negara anggota OECD di tahun 2017 rata-rata mengalokasikan 0,7% PDB mereka untuk pendidikan anak usia dini, dan hal ini menyoroti ketimpangan besar dalam investasi.¹⁸ Terkait dengan keterbatasan fiskal, pemerintah Indonesia menempatkan ekspektasi besar pada pelaku dari pihak swasta dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perawatan saat ini dan masa mendatang.

¹⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan untuk Dunia Kerja yang Transformatif, Setara, dan Adil Gender (Jakarta, 2024), 102.

Mengakui, menghargai, dan berinvestasi pada profesionalisasi kerja perawatan

Pengakuan formal atas pekerja perawatan sudah masuk sebagai prioritas kebijakan di peta jalan dan rencana aksi ekonomi perawatan di Indonesia, yang mengidentifikasi berbagai jenis pekerja perawatan, termasuk pengasuh anak, perawat/pendamping lansia, pekerja perawatan di tingkat masyarakat (komunitas) dan desa, pekerja rumah tangga, pekerja perawatan yang didukung layanan digital, dan pekerja migran yang melakukan kerja rumah tangga dan kerja perawatan. Akan tetapi, RUU Pekerja Rumah Tangga yang sudah lama disusun tidak kunjung disahkan sebagai UU, yang akan dapat memastikan perlakuan yang adil, syarat kerja yang layak, dan pengakuan di mata hukum bagi salah satu segmen terbesar dalam kerja perawatan di Indonesia.

PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT UTAMA

PENDUKUNG

- Ekonomi perawatan menjadi **prioritas kebijakan utama** (mis., *ASEAN's Comprehensive Framework on the Care Economy 2021*)
- Pesatnya kenaikan permintaan akan perawatan mendorong upaya lebih lanjut
- **Solusi perawatan berbasis masyarakat (komunitas)** terus tumbuh dengan dukungan pemerintah

PENGHAMBAT

- Adanya budaya yang mengandalkan perawatan oleh di/keluarga membatasi berkembangnya pasar formal kerja perawatan
- Tantangan dalam koordinasi antar-kementerian yang mempengaruhi pengambilan kebijakan
- **Keterbatasan anggaran pemerintah** membatasi investasi dan prioritas kebijakan di bidang perawatan
- **Pengiriman pekerja perawatan untuk bekerja di luar negeri** mengalihkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri
- Kurangnya **data yang komprehensif** untuk memetakan permintaan dan penawaran dalam layanan perawatan saat ini.



Di sektor swasta, inisiatif pengasuhan anak yang didukung pemberi kerja makin berkembang, meski sifatnya masih terbatas dan dengan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan pegawainya saja, atau didukung oleh program internasional. Sebagai contoh, Indonesia Business Coalition for Women's Empowerment, Investing in Women, dan Kerja Sama Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (Prospera) bersama-sama menyusun suatu panduan: **A Guide to Employer-Supported Childcare (Panduan Dukungan Pengasuhan Anak bagi Pemberi Kerja)**. Panduan ini membantu para pemberi kerja dalam proses seperti misalnya membuat sarana pengasuhan/penitipan anak atau melibatkan pihak ketiga yang dikontrak untuk menyediakannya, memberi dukungan tidak langsung seperti tunjangan atau subsidi, atau menyediakan sistem kerja fleksibel sehingga orang tua dapat mengurus anaknya bila diperlukan. Panduan ini juga menjabarkan bagaimana memastikan fasilitas yang ada bisa memenuhi standar yang berlaku sesuai aturan hukum di Indonesia. Upaya ini sejalan dengan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang telah disahkan di tahun 2024.



Klik di sini atau pindai kode di atas
untuk mengunduh dokumen Panduan.

Berubahnya Permintaan akan Perawatan dan Kesenjangan Ekonomi Perempuan¹⁹

Perubahan permintaan perawatan berakar pada isu ketidakimbangannya pembagian kerja perawatan senantiasa muncul, yang makin dikuatkan oleh tatanan sosial, politik, dan hukum yang menempatkan ekspektasi pada perempuan sebagai pihak utama yang melakukan perawatan. Naiknya permintaan akan perawatan bisa menghambat partisipasi perempuan di angkatan kerja, khususnya dalam pekerjaan formal, akibat ketiadaan waktu dan menanggung beban melakukan perawatan tanpa dibayar. Tekanan pada perempuan ini kemungkinan akan bertambah, kecuali apabila dilakukan transformasi bermakna dalam sistem perawatan. Seiring dengan rata-rata tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki, banyak negara gagal memanfaatkan investasi penting ini, sehingga akhirnya merugikan perempuan dan perekonomian.

Investasi dalam layanan dan sarana-prasarana perawatan dapat mengurangi beban perawatan tidak dibayar dan membantu perempuan memasuki lapangan kerja.

Meluasnya bidang kerja perawatan yang dibayar memberikan peluang kerja lebih lanjut bagi semua gender. Hal ini juga memungkinkan lebih banyak orang memasuki angkatan kerja, terutama perempuan. Akan tetapi, lapangan kerja yang tercipta harus disertai dengan pemberian upah yang adil/wajar, perlindungan hukum, dan pengakuan atas kerja perawatan sebagai pekerjaan yang memerlukan keterampilan (dilakukan oleh tenaga kerja terampil).

Di Indonesia, pekerja rumah tangga secara khusus menanggung kebanyakan kerja perawatan sehari-hari, namun mereka kerap bekerja di luar kerangka perlindungan ketenagakerjaan. Pekerja perawatan sering menghadapi isu dibayar dengan upah rendah, ketidakpastian kerja, dan terbatasnya akses ke perlindungan sosial.

Peraturan perundang-undangan di tingkat nasional serta kebijakan di tempat kerja (mis., cuti bagi orang tua dan cuti untuk keperluan merawat, sistem kerja fleksibel) dapat mendukung redistribusi tanggung jawab perawatan yang tidak dibayar di antara semua gender.

KETERKAITAN DENGAN HAL LAIN YANG TURUT MEMPENGARUHI DAMPAK PADA KESETARAAN EKONOMI PEREMPUAN AKIBAT BERUBAHNYA PERMINTAAN AKAN PERAWATAN



Perempuan berpendapatan rendah dan di pedesaan kerap menghadapi tumpukan kendala — hal ini karena mereka tidak sanggup membayar biaya layanan perawatan yang tersedia, atau karena mereka-lah yang menjadi penyedia layanan perawatan bagi keluarga yang berpendapatan lebih tinggi, biasanya sebagai pekerja informal dengan upah minim serta perlindungan hukum dan sosial yang terbatas.



Perempuan migran kerap menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengakses dukungan perawatan, karena mereka tidak punya kerabat yang tinggal dekat sebagai jaringan informal dan mungkin tidak terbiasa dengan layanan perawatan dibayar (resmi/formal) atau menghadapi kendala dalam mengakses layanan perawatan bermutu di tempatnya.

¹⁹ Kesenjangan ekonomi sebagaimana didefinisikan dalam dokumen IW yang berjudul *Women's Economic Equality Framework* (Juli 2024), ialah kapasitas bagi orang dengan gender apa pun untuk berpartisipasi dalam, berkontribusi pada, dan mendapatkan manfaat dari perekonomian (baik dibayar maupun tidak dibayar) yang mengakui nilai penting kontribusi mereka, menghargai martabat mereka, dan memungkinkan mereka untuk menegosiasikan pembagian yang lebih adil atas keuntungan dari pekerjaan.



Perempuan penyandang disabilitas, atau orang yang merawat penyandang disabilitas, menghadapi tantangan yang unik dalam menyeimbangkan antara memberikan perawatan dan partisipasi ekonomi—karena relatif terbatasnya ketersediaan layanan perawatan yang bermutu untuk disabilitas serta pendekatan yang menekankan dukungan pada kemandirian.

Implikasi bagi Pemerintah, Sektor Swasta, dan Masyarakat

Adanya peta jalan dan rencana aksi untuk ekonomi perawatan, seperti yang ada di Indonesia, memberikan sinyal bahwa terdapat komitmen yang kuat dari pemerintah yang dapat mendorong keterlibatan sektor swasta dan pemangku kepentingan lain secara lebih luas. Akan tetapi, implementasi yang efektif dan kolaborasi menjadi penting.

Karena terbatasnya ruang fiskal, pemerintah harus **merangkul sektor swasta** untuk dapat menyediakan perawatan. Investasi sektor swasta di bidang perawatan dapat didorong dengan cara:

- Memperkuat kerangka peraturan guna memfasilitasi keterlibatan sektor swasta untuk memastikan layanan yang bermutu, terjangkau, dan adil.
- Memberi insentif pajak, memberi subsidi pembebasan lahan, dan menyederhanakan aturan perizinan.
- Memberikan panduan yang jelas tentang cara memperoleh insentif yang ditawarkan, memastikan transparansi, dan mengurangi hambatan administrasi.

12 REKOMENDASI UTAMA

01	Menyusun dan memperkuat kerangka ekonomi perawatan di tingkat nasional	02	Mengalokasikan sumber daya fiskal secara strategis	03	Memanfaatkan peran sektor swasta dalam penyediaan perawatan	04	Berinvestasi dalam berbagai alternatif perawatan, termasuk perawatan yang fleksibel, di rumah, dan di tingkat masyarakat
05	Menyusun dan memperkuat kebijakan ketenagakerjaan terkait perawatan	06	Memberi pengakuan, mengakui nilai penting, dan berinvestasi dalam upaya profesionalisasi kerja perawatan	07	Meningkatkan pengumpulan data serta pemantauan dan evaluasi	08	Mendorong norma perawatan yang berkeadilan
09	Mendorong pertumbuhan produktivitas ekonomi yang tanggap pada kebutuhan perawatan	10	Meningkatkan pendekatan berbasis otonomi dan kesetaraan di bidang perawatan	11	Berinvestasi pada penelitian lebih lanjut tentang perawatan yang responsif gender	12	Menyusun rencana kontinjensi di bidang perawatan dalam menghadapi peristiwa yang tidak diperkirakan dan berdampak besar

Simpulan

Dalam waktu 25 tahun ke depan, permintaan akan perawatan di Indonesia diperkirakan akan meningkat, dengan turut dibentuk oleh peta jalan ekonomi perawatan nasional dan tujuan penuh ambisi untuk meningkatkan partisipasi perempuan di angkatan kerja. Komitmen kebijakan ini, bersama dengan pergeseran demografi, akan menimbulkan tekanan pada perawatan yang umumnya dilakukan di keluarga, menciptakan lebih banyak permintaan untuk mendapatkan perawatan yang bermutu, mudah diakses, dan berbayar. Populasi yang menua, meningkatnya prevalensi disabilitas, turunnya angka kesuburan, dan migrasi internal juga makin mempercepat perubahan ini, meningkatkan kebutuhan akan perawatan di berbagai tingkatan hidup, mulai dari anak hingga lansia dan disabilitas.

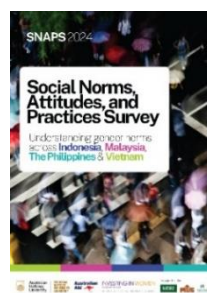
Seiring dengan Visi Indonesia Emas 2045, pemerintah mendorong agar semakin banyak perempuan memasuki angkatan kerja dan bertahan di dunia kerja, dan dengan demikian norma gender dan dinamika kuasa harus diatasi guna memastikan kesetaraan dalam pembagian tanggung jawab perawatan.

Dari tiga negara yang dikaji, Indonesia merupakan satu-satunya yang sudah memiliki kerangka ekonomi perawatan. Meskipun hal ini penting, terbatasnya dana publik mensyaratkan keterlibatan sektor swasta yang lebih besar. Sektor swasta telah berperan penting sebagai penyedia utama layanan perawatan, pelatihan, dan inovasi. Sebagai contoh, makin banyak inisiatif pemberi kerja dalam penyediaan pengasuhan anak, meskipun masih terbatas dan kerap dilakukan di bawah dukungan program internasional.

Kerangka ekonomi perawatan Indonesia memberikan fondasi yang kuat untuk mengubah sistem perawatan, meski saat ini masih terlalu dini untuk menilai tingkat keberhasilannya. Implementasi yang efektif, kolaborasi yang lebih erat antara publik dan swasta, serta upaya sadar yang diarahkan untuk mengatur ulang pembagian kerja perawatan yang tidak berbayar dan upaya meletakkan kerja perawatan dalam kerangka profesional tetap penting dalam mewujudkan sistem perawatan yang inklusif dan berkesinambungan.



Klik [di sini](#) atau pindai kode untuk mengunduh laporan lengkap **Future Demand for Care**.



Klik [di sini](#) atau pindai kode untuk mengunduh laporan terkait, **Social Norms, Attitudes and Practices Survey**.

